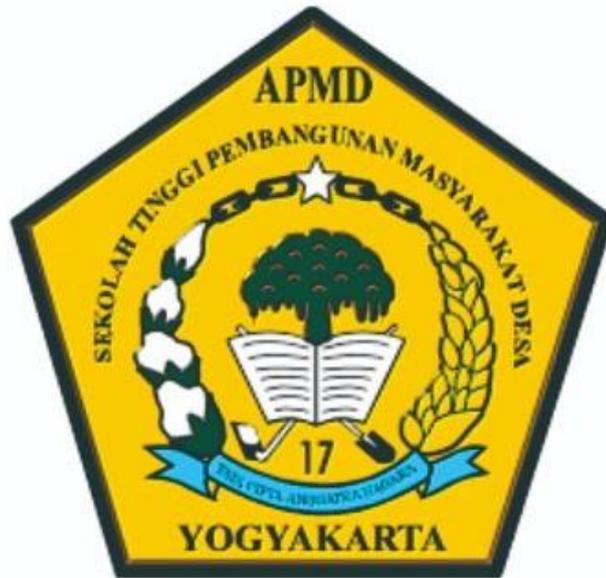


**SKRIPSI**  
**SINKRONISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI**  
**KABUPATEN BANTUL**



**Di Susun Oleh :**

**Aldy Rama Ruberda**

**17520045**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN – S1**  
**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**  
**YOGYAKARTA**  
**2023**

**SINKRONISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI  
KABUPATEN BANTUL**

**(Studi Penelitian Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Di Susun Oleh :**

**Aldy Rama Ruberda**

**17520045**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN – S1**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

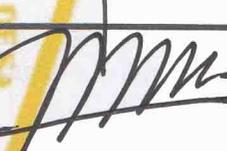
Hari : Kamis

Tanggal : 6 April 2023

Waktu : 11.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Ir. Nelly Tiurmida, M.P.A</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Rijel Samaloisa

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldy Rama Ruberda

NIM : 17520045

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantul**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh yang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 6 April 2023

Yang menyatakan



Aldy Rama Ruberda

NIM: 17520045

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Berkat dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantul” dengan lancar dan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan yang telah penulis terima selama melakukan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Sutoro EkoYunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis;
3. Ir. Nelly Tiurmida, M.P.A selaku dosen pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
4. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si dan Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji dan sekaligus yang memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi penulis;
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;

6. Bapak, Mama, Kakek, Nenek serta Kakak dan Adik yang selalu memberikan motivasi dan doa;
7. Teman-teman seperjuangan di kampus tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per-satu yang telah dengan cara nya masing-masing membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 6 April 2023

Penulis



Aldy Rama Ruberda  
NIM: 17520045

## **MOTTO**

*Karena masa depan sungguh ada, dan harapan mu tidak akan hilang*

*( Amsal 23:17-18 )*

*Soli Deo Gloria*

*( Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan )*

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas setiap berkat, rahmat, dan karunia-Nya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, saya ingin mempersembahkan skripsi ini untuk semua orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya, Maternus Suwin dan Marsella Ncilus. Terimakasih yang tak terhingga atas semua doa, dukungan, usaha, dan jerih payah sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
2. Untuk saudara-saudara saya Yohana Desita Alda, Agustina Hutri Alia yang selalu memberikan dukungan, yang mau mendengarkan keluh kesah dan bagian dari semangat saya untuk menyelesaikan studi ini.
3. Terimakasih untuk kakek dan nenek dari pihak bapak ataupun mama tercinta, terutama alm kakek darius dalok dan alm kakek karel yang selalu menjadi acuan saya untuk cepat menyelesaikan studi ini.
4. Untuk Almamater tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Untuk dosen pembimbing saya Ir. Nelly Tiurmida, MPA. Terimakasih yang tak terhingga dalam membimbing dan mengajarkan saya dengan segala kebaikan hati, tanpa ibu saya tidak bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.

6. Terimakasih untuk sahabat-sahabat saya Margie Dayana, Yohanes Nopan, Gabriel Ahimsa, Candra, kornelius Arpega, frengky , Rikho, Sintia Novianti, Monica dyah ayu, Faustinus Duwon Galih, Adria Karina.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Literatur Review.....	8
F. Kerangka Konsetual.....	15
A. Pelaksanaan Pembangunan.....	16
B. Pembangunan Pariwisata.....	19
C. Pariwisata.....	22
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	26
H. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Lokasi Penelitian.....	27
3. Data dan Sumber Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28

5. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB II GAMBARAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Pariwisata .....	32
B. Gambaran Tempat Pariwisata.....	34
1. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam .....	34
2. Obyek dan daya tarik wisata Budaya .....	38
3. Obyek dan Daya Tarik Wisata Buatan/ Minat Khusus .....	42
A. Jumlah Kunjungan Pendapatan Dari Pariwisata .....	44
B. Gambaran Geografi Kabupaten Bantul.....	45
C. Gambaran Demografi Kabupaten Bantul.....	46
<b>BAB III ANALISIS SINKRONISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>49</b>
A. Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata .....	49
B. Capaian Pembangunan Pariwisata .....	56
C. Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata.....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka .....	72
Dokumentasi .....	76
Lampiran.....	78
1. Pedoman Wawancara .....	78
2. Surat Tugas.....	81
3. Permohonan Ijin Penelitian.....	82
4. Penunjukan Dosen .....	83
5. Kendali Bimbingan Skripsi .....	84

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1. Data Kunjungan Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata 2017-2021 .....	44
Tabel 2. 2. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Bantul.....	45
Gambar 2. 2. Data jumlah penduduk menurut jenis kelamin .....	47
Gambar 2. 3. Struktur Organisasi.....	48

## INTISARI

Sejak di berlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah masing-masing sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan undang-undang. Salah satunya kewajiban tersebut yaitu mengenai pembangunan atau sesuai yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 dalam Bab VI pasal 31 ayat 2 untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional atau daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yang digunakan adalah Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pariwisata. Teknik Pengumpulan Datanya adalah dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Metode analisis datanya adalah dengan menggunakan metode reduksi data (Pengumpulan data), data display (Penyajian data), dan penarikan kesimpulan serta melibatkan informan sebagai orang yang mengerti tentang penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perencanaan pembangunan dan sinkronisasi di Kabupaten Bantul melibatkan 5 unsur yaitu Bappeda Kabupaten Bantul, Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, dinas pariwisata, pokdarwis, dan melakukan dengan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan. Tahapan musyawarah merupakan tahapan dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada pemerintah dan masyarakat. Musyawarah pembangunan dilakukan untuk perencanaan pembangunan yang demokratis dan berbasis pada masyarakat sekitar, musyawarah pembangunan merupakan yang demokratis di tingkat Kabupaten, sebagai cara menindak lanjuti dalam pembangunan yang bertujuan untuk sinkronisasi dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul. Kata Kunci: Dinamika, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pariwisata

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam undang-undang dasar tahun 1945 yang tercantum pada alenia ke empat melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah daerah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan merupakan proses terbesar dan selalu terencana dalam menuju suatu perubahan ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya terjadi. Pembangunan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan *good governance*. Pembangunan merupakan program-program yang sudah di rencanakan atau sudah menjadi tujuan dalam pencapaian pemerintahan yang baik yang berasal dari pembangunan daerah.

Pembangunan dapat berjalan dengan baik ketika semua sudah di rencanakan dan ada suatu peraturan yang berkaitan dengan pembangunan yang dapat menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang maupun jangka tahunan yang selalu melibatkan unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat yang melibatkan di tingkat pusat maupun masyarakat. Pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu pembangunan di Indonesia mengalami kegagalan dalam pembangunan

yaitu pasca *covid* yang melanda Indonesia yang terjadi pada saat ini. Yang melibatkan kebangkrutan di segala elemen yang terjadi dapat memberhentikan pembangunan di segala aspek. Kegagalan pembangunan tidak terjadi hanya karena *covid* namun juga pelaksanaan di lapangan yang dari dulunya sudah tidak merata .

Salah satu upaya pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan menetapkan sebuah aturan yang menetapkan Dinas Pariwisata sebagai suatu perangkat daerah. Dengan adanya Dinas Pariwisata untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan yang secara merata dan adil dengan otonomi daerah , Dinas Pariwisata juga sebagai otak dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Sejak di berlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah masing-masing sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan undang-undang. Salah satunya kewajiban tersebut yaitu mengenai pembangunan atau sesuai yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 dalam Bab VI pasal 31 ayat 2 untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional atau daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Karena dengan pembangunan untuk memperbaiki kondisi yang buruk menjadi baik dan yang belum ada akan menjadi ada. Dinas pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting karena Dinas Pariwisata ini lah yang mempunyai suatu peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang membantu seorang kepala daerah untuk membuat suatu kebijakan atau rencana dalam pembangunan serta evaluasi maupun penilaian dalam sebuah pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan yang tidak merata membuat pembangunan kurang berjalan lancar karena pemerintah kurang melakukan koordinasi atas pemerintah sub bagian, kelompok sadar wisata maupun, pelaku wisata sehingga pemerintah tidak mengetahui apa yang perlu di bangun dan di tempat wisata mana yang perlu di tambahkan lagi, sehingga pembangunan hanya selalu fokus pada sebagian wisata saja yang pemerintah tau saja. Sehingga terjadi banyak permasalahan dan sehingga banyak pembangunan yang berjalan sendiri yang di lakukan oleh kelompok sadar wisata sehingga perlunya sinkronisasi.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan yang utama adalah pandemi *Covid-19*. Akibat pandemi ini mengakibatkan hampir seluruh anggaran terkonsentrasi dan dialokasikan bagi penanganan *Covid-19*. Beberapa faktor lain seperti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, kasus stunting, kualitas pendidikan dan tenaga pendidik yang belum merata, kualitas tenaga kerja yang tak memenuhi kompetensi, ketimpangan pendapatan dan wilayah, pertumbuhan PDRB per kapita belum optimal, kualitas industri kreatif yang belum optimal, cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi belum optimal terpenuhi, alih fungsi lahan pertanian,

penurunan kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya penanganan kenakalan remaja dan keselamatan lalu lintas, angka kemiskinan tinggi, kasus intoleransi, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan belum optimal, sumber pendapatan daerah belum terdali optimal serta masih adanya ketidakpuasan warga pada pelayanan publik. Ada 4 isu strategi yang harus konsisten dilaksanakan yakni terkait reformasi birokrasi yakni tata kelola pemerintahan, SDM yakni pertumbuhan jasmani dan kemampuan intelektual, pendapatan dan ketimpangan wilayah serta keberlanjutan yakni degradasi, lingkungan sosial dan manajemen bencana.

Pemerintah Kabupaten Bantul menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan di tahun depan. Semua organisasi perangkat daerah diharapkan dalam menyusun program kerja dapat dihubungkan dengan dunia pariwisata. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, pariwisata merupakan sektor yang paling cepat daya unkitnya dalam pembangunan ekonomi di Bantul berdasarkan hasil analisis instansinya bersama sejumlah lembaga.

Bahkan dunia pariwisata akan menjadi ujung tombak perekonomian yang dimulai sejak 2021. “Maka seluruh kegiatan OPD harus dikaitkan dengan wisata,” pariwisata tidak hanya berbicara soal jumlah kunjungan dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun juga efek dominanya di masyarakat, mulai dari kulinernya, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Kemiskinan dan ketimpangan bisa diatasi dari sektor pariwisata. Jadi pariwisata ini bisa menjadi lokomotif pembangunan daerah,” banyak objek wisata yang dikelola masyarakat. selain itu warga juga terlibat dalam mengelola parkir, hingga menjajakan kuliner khas

sekitar. Saat ini pihaknya juga terus berupaya agar wisatawan yang datang ke Bantul tidak hanya dapat menikmati suasana alamnya, namun juga atraksinya, mulai dari atraksi budaya, sejarah, kuliner dan olahraga. Bahkan wisatawan tidak hanya dapat membeli oleh-oleh khas Bantul, namun juga bisa merasakan bagaimana cara pembuatannya. Wisata ini sering disebut wisata pengalaman.

Untuk mengembangkan layanan pariwisata ini, tidak cukup hanya di Dinas Pariwisata namun juga butuh keterlibatan instansi lain. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dalam pembangunan infrastruktur menuju objek wisata; Dinas Koperasi dan UKM yang membidangi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah; dan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mempermudah layanan pariwisata; Dinas Lingkungan Hidup terkait kebersihan lokasi wisata; dan Satpol PP terkait menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Pembangunan di Bantul Tahun 2021 meletakkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan daerah. Selain itu juga perlu upaya transformasi ekonomi melalui pengembangan pusat pertumbuhan baru dan penyelenggaraan kegiatan yang dikemas secara spektakuler. Pembangunan fasilitas dan sarana pariwisata dalam meningkatkan wisatawan yang datang, yang menjadi salah satu permasalahan penghambat wisatawan yang berkunjung yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana karena wisatawan akan memilih tempat wisatawan yang lebih lengkap dengan segala fasilitasnya. Dari sinilah pemerintah harus meningkatkan fasilitas dan sarana dan prasarana maka dari itu pemerintahan daerah harus aktif, profesional,

baik, dan berkelanjutan untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana agar segalanya bisa maksimal.

Menyadari bahwa Kabupaten Bantul banyak tempat wisata yang unggul sesuai dengan potensi daerah yang berkualitas dengan wisata alamnya, wisata bahari dan wisata budaya maka dengan ini pemerintah harus membangun segala kebutuhan yang ada di tempat pariwisata contohnya pembangunan resarea makan, pusat oleh-oleh khas daerah, kamar mandi, tempat ibadah, kamar untuk menginap (hotel), perjalanan wisata (travel agent), industri kerajinan dan fasilitas umum yang mendukung di tempat pariwisata tersebut sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian rakyat. peneliti akan meneliti bagaimana pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul.

Pariwisata memerlukan adanya suatu objek wisata yang mempunyai keunikan dan kekhasan tersendiri, sehingga menjadi daerah tujuan wisata bagi para penikmat wisatawan untuk berkunjung. Undang – undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjelaskan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi kunjungan wisatawan, kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Bantul dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperluas lapangan kerja. Kesuksesan pembangunan di bidang pariwisata dapat ditinjau dari jumlah kunjungan wisatawan, PAD yang di dapatkan Kabupaten Bantul di sektor

pariwisata. Namun dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di sektor pariwisata ditemukan berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal yang menghambat salah satunya seperti masyarakat pengelola tempat wisata tidak pernah di beri pelatihan atau bimbingan untuk peningkatan kapasitas terkait pengelola wisata, kurang keterlibatan masyarakat yang ada di wilayah pariwisata dalam setiap perencanaan atau pengembangan khususnya pengelola tempat wisata sehingga banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara proyek besar yang siap dilaksanakan Kabupaten Bantul yakni implementasi UU Cipta Kerja, Posyandu, PAUD, Puskessos dengan format (*One Stop Service*), Kabupaten Layak Anak, Kabupaten kreatif, permukiman bersih dan sehat serta infrastruktur. Kabupaten Bantul saat ini akan menjadi muka Daerah Istimewa Yogyakarta dari sisi selatan maka dari itu Kabupaten Bantul memiliki tugas yang sangat berat dalam melaksanakan pembangunan dari segi infrastruktur maupun fasilitas umum tentunya pada *pasca covid* seperti ini banyak anggaran yang terpakai bukan untuk pembangunan namun untuk memberikan bantuan sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat menjadi sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi mahasiswa.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya dalam menangani penyusunan pelaksanaan pembangunan.

## **E. Literatur Riview**

Penelitian terdahulu yang di jadikan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam penelitian jurnal Yudi Andiana dan Ernawati Hendrakusuma berjudul Sinkronisasi Perencanaan Ruang Wilayah (*SpatialPlanning*) Dengan Perencanaan Pembangunan (*SectoralPlanning*). Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah pembangunan yang terjadi saat ini belum terintegasi

secara benar, pembangunan hanya mefokuskan pada target dan tujuan daerah secara khusus. Selain itu pembangunan di daerah cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada akibatnya rencana tata ruang yang di buat cenderung hanya mejadi pedoman semata.

Hasil penelitian ini bahwa kebijakan dan strategi yang di lakukan dalam rangka mewujudkan sistem jaringan infrastruktur di kota bandung baik dalam penataan ruang maupun dalam perencanaan pembangunan telah sepenuhnya sinkron dan konsisten. Hasil positif yang di temukan memberikan gambaran bahwa dalam mewujudkan sistem jaringan infrastruktur kota bandung yang di rencanakan telah lebih mudah untuk di jalankan, mengingat kebijakan dan strategi telah selaras dan saling mengisi satu sama lainnya.

Persamaan : pembangunan yang terjadi belum merata di segala bidang.

Perbedaan : pembangunan di kabupaten bantul selalu memperhatikan rencana tata ruang.

Andiana, Y., & Hendrakusumah, E. (2015). Sinkronisasi Perencanaan Ruang Wilayah (*Spatial Planning*) Dengan Perencanaan Pembangunan (*Sectoral Planning*). *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota*, 94-101.

2. Dalam penelitian jurnal Kurniansyah yang berjudul Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017 Penelitian ini akan meninjau sinkronisasi perencanaan pembangunan pasca pemilihan kepala daerah serentak di Kota Cimahi tahun 2017, dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian adalah kelompok

aparatur pemerintahan yang terlibat dalam proses sinkronisasi. Penelitian menyimpulkan bahwa proses sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kota Cimahi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan daerah.

Proses sinkronisasi perencanaan pembangunan berada dalam transisi kepemimpinan yang berimbas pada penyusunan RKPD Tahun 2018 yang menjadi landasan/acuan penyusunan dokumen KUA-PPAS RAPBD tahun 2018. Walaupun masih ada kendala kapasitas SDM dan pemahaman aparatur dinas teknis dan beban anggaran APBD tahun 2018, pola sinkronisasi prioritas program menjadi strategi mencapai efektivitas kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota Cimahi Periode 2017-2022.

Persamaan : Data yang di ambil dari kepala daerah sesuai dengan penelitian.

Perbedaan : Pembangunan terjadi pada masa transisi pemilihan kepala daerah.

Kurniansyah, D. (2018). Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017. *Jurnal PolitikomIndonesiana*, 3(2), 262-275.

3. Dalam penelitan jurnal Matodang yang berjudul Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik secara simultan

maupun parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode sensus, jumlah responden adalah 63 SKPD yang terdiri dari badan, dinas, kantor, dan kecamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner yang berisi 30 (tiga puluh) pernyataan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja SKPD (2) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD (3) partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD dan (4) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

persamaan : sesuai dengan peraturan daerah.

Perbedaan : pembangunan tidak selalu sinkron dengan perencanaan pembangunan.

Matondang, N. I., Basri, H., & Arfan, M. (2015). Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(4).

4. Dalam tesis Aziz yang berjudul "Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kabupaten ditinjau dari Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten

Kubu Raya)”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, dalam kenyataannya perencanaan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Kubu Raya selalu tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak sinkronan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Batu Ampar dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah: belum tersedianya sumber daya manusia perencanaan , masih kurangnya konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, koordinasi antar perangkat daerah untuk proses perencanaan masih lemah, tidak selarasnya visi dan misi Kepala Desa dan Bupati yang sama-sama memiliki dokumen perencanaan pembangunan RPJM Desa dan RPJM Daerah; adanya unsur kepentingan politik dari pemangku kepentingan; lemahnya koordinasi antara desa dan Kabupaten dalam penyusunan perencanaan pembangunan; kurang memperhatikan usulan perencanaan pembangunan desa; dan belum adanya *goodwill* dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menganggap desa adalah mitra dan subjek, tetapi masih menganggap desa adalah objek sehingga pada saat perencanaan program kegiatan diusulkan selalu diabaikan. Upaya yang dilakukan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Batu Ampar dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah: menjalin komunikasi terutama dalam perencanaan pembangunan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kubu

Raya; konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan; menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman daerah dalam menyusun perencanaan daerah; dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam mendukung pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Perlunya kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan pemerintah Kabupaten dalam hal perencanaan pembangunan dengan mengacu pada usulan skala prioritas dan kebutuhan serta keperpihakan kepada masyarakat; dan Perlu adanya koordinasi secara terpadu antara pemerintah desa dengan pemerintah Kabupaten dalam hal perencanaan pembangunan, agar tidak terjadi ketidaksinkronan yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Persamaan : berpedoman pada peraturan.

Perbedaan : perencanaan tidak ada di daerah Kubu Raya.

5. Dalam Sigit Prayitno yang berjudul “ SINKRONISASI TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR DALAM Mendukung PROGRAM PEMBANGUNAN” Kota Bogor dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kota dalam menyiapkan pedoman pelaksanaan pembangunan yang memuat rencana dan arahan program-program pembangunan sektoral dan tata ruang. Upaya sinkronisasi antara program pembangunan dengan rencana tata ruang

adalah menggunakan rencana tata ruang dalam penyusunan program pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW; (2) Menganalisis kesesuaian program pembangunan dengan RTRW; (3) Menganalisis penggunaan RTRW dalam penyusunan program pembangunan; dan (4) Merumuskan strategi peningkatan sinkronisasi tata ruang dengan program pembangunan. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Overlay, Analisis Deskriptif dan Analisis A'WOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian penggunaan lahan tahun 2013 dengan rencana pola ruang mencapai 59,58%, belum terealisasi 36,41%, tidak sesuai 4,01%. Program fisik yang sesuai dengan RT/RW menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata 87,68 %. Sebanyak 75% instansi sudah menggunakan RTRW dalam penyusunan program pembangunan, sedangkan 25% instansi masih belum. Strategi yang menjadi prioritas dalam sinkronisasi rencana tata ruang dengan program pembangunan adalah menerapkan peraturan tentang rencana tata ruang dan rencana pembangunan secara tegas agar komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan rencana tata ruang dapat terwujud dengan baik.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **a. Sinkronisasi**

Sinkronisasi menurut kamus bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2012 : 1314) kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada saat waktu yang sama ; serentak ; sejalan ; sejajar ; sesuai ; selaras. Sesuai dengan penelitian ini bahwa sinkronisasi yang memiliki arti menyingkronkan atau menyesuaikan.

Menurut (Endang 2013 : 5) sinkronisasi yang di maksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan atau peraturan perundang-undangan secara vertical berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Sinkronisasi pembangunan sering menimbulkan permasalahan mengenai ketidaksesuaian dalam pembangunan maupun pemerataan dalam pembangunan di Kabupaten. Kegagalan Pembangunan di Indonesia Krisis sosial yang melanda Indonesia sejak 1997 hingga saat ini bukan terjadi begitu saja, melainkan suatu proses panjang yang melibatkan seluruh *stake holders*. Dapat dikatakan, krisis multidimensi yang terjadi hingga saat ini merupakan wujud nyata dari kegagalan pembangunan. Puncak krisis adalah terjadinya kerusuhan 1998 yang disusul dengan mundurnya Presiden Soeharto. Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh karut-marutnya pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan dimulai dari hulunya. Geografi Indonesia sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau dengan sarana komunikasi dan pengangkutan yang belum sempurna. Hal ini mengakibatkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Kemudian

keadaan rakyat, yang menjadi sarana penerangan dan penyuluhan, masih sangat heterogen dengan kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan serta kecerdasan yang masih sangat terbatas. Keterikatan sebagian besar rakyat pada tradisi dan kondisi lingkungan juga merupakan hambatan untuk mengadakan pembaharuan dalam pandangan maupun sikap hidupnya. Pembangunan sangat dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan warga masyarakat (berupa dukungan kepada kebijakan pemerintah). Hal ini perlu penetapan suatu hal untuk menetapkan peraturan yang menjadi acuan dalam sebuah pembangunan di wilayah Kabupaten agar pembangunan menjadi merata sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah harus selaras dan sinkron untuk mendukung prioritas Nasional Tahun 2022 hal ini dilakukan untuk melihat anggaran dana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan yang sudah menjadi keinginan Kabupaten Bantul.

Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi sebagai suatu upaya atau kegiatan untuk menyesuaikan. Bagaimana pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembangunan di daerah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam peran serta pembangunan dalam hal kepentingan umum.

#### **b. Pelaksanaan Pembangunan**

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan cabang dari perencanaan tata kelola lahan dan berhubungan dengan penetapan efisien dari kegiatan penggunaan lahan infrastruktur, dan pertumbuhan pemukiman di era yang jauh lebih besar dari sebuah

kota atau wilayah. (Mudrajatkuncoro, 2018:75) dan undang undang Nomor 25 Tahun 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan. Dengan memperhitungkan sumber data yang tersedia.

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan terhadap daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan dari pembangunan pada umumnya yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara lebih berguna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Beberapa pengertian mengenai perencanaan pembangunan dalam berbagai bentuk definisis, dalam GTZ (*German Technical Cooperation*) dan USAID-Clean Urban Project (Ali Kabul 2017 : 48) mendefinisikan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu sistemmatik dari berbagai pelaku atau aktor baik untuk publik, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkat yang berbeda untuk menghadapi, saling tergantung aspek-aspek fisik, sosial ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lingkunganlainya dengan cara : a. terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; b. merumuskan tujuan-tujuan dan melaksanakan pembangunan daerah; c. menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi); dan d. melaksanakan dengan menggunakan sumber daya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat di tangkap secara berkelanjutan.

Sedangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah.

Di kemukakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan atau wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diuntut untuk melakukan perencanaan di berbagai bidang sebagai tahapan sebelum melaksanakan pembangunan daerah. pemerintah daerah perlu perencanaan yang akurat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah guna sebagai acuan dalam penilaian pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 258 Tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa Pembangunan daerah di perlukan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah di serahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. Sedangkan pasal 259 disebutkan bahwa kordinasi teknis pembangunan di lakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penegndalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan atau wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di gunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang di laksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut harus memperhatikan antara lain, kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang ada. dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **c. Pembangunan Pariwisata**

Alasan utama pembangunan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu Negara sangat erat kaitanya dengan pembangunan perekonomian daerah atau Negara tersebut. Dengan kata lain, pembangunan pariwisata pada suatu daerah selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaatnya bagi rakyat banyak. Alasan kedua pembangunan pariwisata itu lebih banyak bersifat non-ekonomis, adanya kegiatan pariwisata akan

menimbulkan hasrat dan keinginan untuk memelihara semua aset wisata tersebut. Alasan ketiga mengapa bidang pariwisata perlu dikembangkan ialah untuk menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, mengetahui tingkah laku orang lain terutama bagi masyarakat dimana proyek kepariwisataan dibangun. Ada lima bidang utama ketertiban sektor publik dalam pariwisata yaitu koordinaasi, perencanaan, perundang-undangan dan peraturan, kewirausahaan dan stimulasi.

Koordinasi, pariwisata yang terdiri dari berbagai macam sektor sering menimbulkan konflik penting, maka dalam memanfaatkan sumber daya sangat penting. Selain itu penyeimbangan berbagai peran dalam proses pembangunan pariwisata terjadi dalam bentuk pengembangan. Perencanaan, terjadi dalam bentuk pembangunan, infrastruktur, promosi, dan pemasaran, (organisasi yang berbeda-beda) dan skala (internasional, nasional, lokal, sektoral). Pelaksanaan pariwisata harus berjalan seiring dengan kebijakan pariwisata. Tetapi dalam bentuk kebijakan, pelaksanaan merupakan proses politik yang hasilnya bisa menjadi domisili bagi kepentingan nilai berbagai pihak. Peraturan dan perundang-undangan; pemerintah mempunyai kekuatan hukum dan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan industri pariwisata. Keterlibatan pemerintah mulai dari kebijakan paspor dan visa, pemanfaatan lahan, tenaga kerja, upah dan lainnya. Stimulasi; pemerintah dapat melakukan stimulasi pariwisata melalui insentif seperti pinjaman berbunga rendah. Pandangan dalam melihat partisipasi dimasyarakat pada sebuah wisata ada dua (1). Partisipasi masyarakat lokal dalam

proses pengambilan keputusan (2). Berkaitan dengan manfaat yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata. Pembangunan obyek wisata dibutuhkan untuk kelanjutan industri pariwisata itu sendiri. Berbagai hal yang menentukan dalam pembangunan suatu wisata.

1. Atraksi wisata Atraksi wisata merupakan daya tarik wisatawan untuk terhibur. Atraksi yang didefinisikan ( sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata, tanpanya bagian utama lain tidak akan diperlukan.

2. Promosi dan pemasaran Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan promosi merupakan bagian penting.

3. Pasar wisata Sama halnya dengan promosi, pasar wisata juga merupakan hal penting, walaupun untuk perencanaan belum/tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, dan sebagainya dari wisata perlu dikumpulkan dari mereka yang berkunjung.

4. Transportasi Transportasi memiliki dampak besar terhadap volume dan lokasi pembangunan wisata.

5. Fasilitas dan pelayanan Fasilitas dan pelayanan ini hal penting yang harus dikaji, karena ini berhubungan dengan keberlanjutan wisata tersebut. layak untuk dikunjungi atau tidak, bagi wisatawan yang sudah pernah berkunjung maupun yang belum berkunjung.

#### **d. Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mempunyai peranan yang sangat penting yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dalam menyejahterakan masyarakat meningkatkan pendapatan asli daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Mascintosh(2008:9) menjelaskan bahwa bahwa pariwisata merupakan perjalanan hubungan yang timbul, mulai dari interaksi wisatawan dari satu pihak, perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah serta masyarakat yang bertindak sebagai tuan rumah dalam proses menarik dan melayani.

Sedangkan menurut Leiper(2008:10) pariwisata adalah suatu sistem terbuka dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan yang luas, mulai dari unsur manusia seperti wisatawan, tiga unsur geografis yaitu : negara asal, negara yang di jadikan tempat transit, dan daerah wisata serta unsur ekonomi.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pariwisata adalah suatu perjalanan yang di lakukan oleh seorang yang di lakukan sementara waktu bukan menetap yang kegunaannya hanya sebagai menikmati perjalanan, memenuhi keinginan dan kebutuhan.

Dalam hal ini pariwisata memberikan pendapatan bagi pemerintah dalam hal pembayaran atau penarikan pajak pada pengelolaan pariwisata itu sendiri, sebagai

dampak pembayaran pajak yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan manfaat pada pembangunan kedepan, sehingga pariwisata menjadi pokok dalam pendapatan perekonomian bagi masyarakat di lingkungan wisata dan pemerintah dalam pendapatan asli daerah.

Jadi dalam hal ini pembangunan pariwisata harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar masyarakat tertarik untuk datang mengunjungi dan menjadi tolak ukur untuk menilai pembangunan pariwisata. Seperti yang dijelaskan Bambang Sunaryo (2013:3) menjelaskan utamanya pada sistem produk kepariwisataan, terdapat berbagai komponen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan destinasi pariwisata (*tourismproductdesigning*) sebagai berikut :

a. Atraksi dan daya Tarik wisata

1. Daya tarik wisata alam

yang dimaksud dengan daya Tarik wisata alam adalah wisata yang dikembangkan dengan lebih banyak berbasis pada anugrah keindahan dan keunikan yang telah tersedia di alam. contohnya dalam daya Tarik wisata ini yang dikembangkan adalah pantai, laut, danau, gunung, hutan, sungai dan air terjun karena ini berbasis anugrah keindahan dan keunikan yang tersedia di alam.

2. Daya Tarik wisata budaya

Yang dimaksud dengan daya Tarik wisata budaya adalah wisata yang dikembangkan lebih banyak berbasis pada hasil karya dan hasil cipta manusia baik yang berupa peninggalan budaya. Contohnya situs.

### 3. Daya Tarik wisata minat khusus

Yang dimaksud daya Tarik minat khusus adalah wisata daya Tarik yang di kembangkan lebih banyak berbasis pada aktivitas untuk pemenuhan keinginan wisatawan secara spesifik. Contohnya pengamatan satwa tertentu, shopping, mancing, Kesehatan, rapat dan aktivitas-aktivitas wisata minat khusus lainnya yang biasanya terkait dengan hobi atau kegemaran seorang wisatawan.

#### b. Amenitas dan Akomodasi

Komponen produk ini sangat penting untuk di perhatikan adalah fasilitas amenities. Yang di maksud dengan amenities atau akomodasi adalah sebagai jenis fasilitas dan kelengkapannya yang dapat di gunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan bersantai dengan nyaman serta menginap semalam melakukan kunjungan kesuatu destinasi.

#### c. Aksesibilitas dan transportasi

Yang dimaksud aksesibilitas dan transportasi adalah segenap fasilitas dan modal angkutan yang memungkinkan dan memudahkan serta membuat nyaman wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi.

#### d. Infrastruktur pendukung

Yang di maksud infrastruktur pendukung adalah keseluruhan jenis fasilitas umum yang berupa prasarana fisik seperti komponen pendukung penghubung seperti Pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, dan jaringan telekomunikasi serta beberapa fasilitas fisik yang lain seperti jaringan listrik, air minum, toilet dan lain sebagainya.

e. Fasilitas pendukung lainnya

Fasilitas pendukung lainnya adalah keseluruhan jenis fasilitas berbagai jenis fasilitas pendukung kepariwisataan yang berfungsi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan melakukan kunjungan di suatu destinasi seperti kenyamanan, rumah makan, biro perjalanan, toko cindramata, pusat informasi wisata, rambu wisata, pusat perbelanjaan, hiburan malam, fasilitas perbankan, dan beberapa kebijakan khusus yang menjadi pendukung kenyamanan bagi wisatawan dalam kunjungan di destinasi.

f. Kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata

Kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata adalah keseluruhan unsur organisasi atau institusi pengelola pariwisata dan termasuk sumber daya manusia pendukungnya, yang terkait dengan manajemen pengelolaan pariwisata di suatu destinasi. Baik dari unsur pemerintah, swasta atau industri, dan masyarakat. Seperti kelembagaan dan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam manajemen pengelolaan kepariwisataan di Indonesia. Contohnya dinas pariwisata beserta keseluruhan unit pelaksana lainnya, asosiasi industri perjalanan wisata (ASITA), persatuan hotel dan restoran indonesia (PHRI), asosiasi pemandu jasa wisata, kelompok sadar wisata maupun masyarakat pariwisata yang terkait dengan kepariwisataan, baik sebagai tenaga kerja, pelaku usaha sebagai tuan rumah dalam suatu destinasi.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan. Yang berfokus pada permasalahan yang terjadi yaitu pembangunan yang belum merata. Fungsi dari Dinas Pariwisata ini di harapkan dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bantul. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada :

1. Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata
2. Program capaian pembangunan Pariwisata
3. Kendala dalam mensinkronisasi pembangunan pariwisata

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sujono dan Ibrahim dalam TjutjuSoendari (2012:2), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang, penelitian deskriptif juga memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln dalam Moelong (2017:5), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3. Data dan Sumber Data**

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data dalam penelitian . Berdasarkan sumbernya, dan data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder data primer dan data sekunder ini adalah : .

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti adalah hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber yang sudah di pilih sesuai dengan bidang dan pengetahuan.

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat, langsung dengan masalah penelitian. Teknik yang digunakan dalam pemilihan narasumber menggunakan *Purposive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. menentukan narasumber

sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian Sugiyono (2019: 85).

### 3. Data sekunder

Berasal dari data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui literatur yang sesuai dengan kajian penelitian di lapangan, serta yang di dapat dari internet yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan di lapangan. Dari hal ini dapat menentukan keberhasilan dalam penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang cukup strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di terapkan. Menurut Sugiyono (2017:104), dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data akan lebih banyak observasi, berperan serta (participant observation) wawancara mendalam (in depth interview) dan yang terakhir adalah dokumentasi (Sugiyono, 2017:105). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang terstruktur.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Observasi merupakan kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut. Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena di dalam objek yang diteliti. Hasil dari proses penelitian tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai. Dalam hal ini peneliti secara langsung mengamati Dinas dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembangunan dalam hal ini yang saya amati adalah bagaimana pembangunan sudah baik atau belum sehingga hal ini menjadi bahan masukan atau hal yang saya dapatkan dalam penelitian.

b. Wawancara

Teknik *interview* atau wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan foto yang dapat berupa dokumen yang terkait dengan sejarah kehidupan, biografi, data demografi dan sebagai bahan acuan untuk melakukan pemetaan wilayah penelitian. Data tersebut sebagai data sekunder yang dapat mendukung dalam penelitian, (Sugiyono 2013 : 326). Dalam hal ini saya mengambil foto pembangunan pariwisata.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2017: 131) teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Kenyataannya dalam analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.

Analisis data merupakan cara dalam mengolah data yang di dapat setelah melakukan penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang sesuai. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengelompokkan data yang sesuai menjadi satuan yang dapat dikelola hingga sesuai dengan tujuan penelitian, Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus penelitian, maka peneliti akan melakukan tiga langkah utama yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:134-142), sebagai berikut :

### a. Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan Data penelitian yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari sampai berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan lebih banyak dan dapat dipercaya. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum

terhadap situasi sosial atau obyek yang diteliti, semua yang di lihat dan didengar akan direkam dan dicatat.

b. Reduksi Data

Reduksi data di lakukan untuk memberikan gambaran yang cukup jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang di peroleh dari penelitian di lapangan yang di lakukan untuk memberikan kemudahan untuk menyimpulkan hasil penelitian di lapangan, dan memberikan kemudahan data mana yang akan di gunakan Penyajian Data. Penyajian data merupakan hasil redukasi yang disajikan dalam laporan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai satu kesatuan (Miles dan Huberman, 1992:16-20)

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dan disusun dalam bentuk uraian tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara melihat kembali pada hasil redukasi dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

**BAB II**  
**PROFIL PARIWISATA KABUPATEN BANTUL DAN BADAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**A. Gambaran Umum Pariwisata Kabupaten Bantul**

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata. Kemudian penjabaran dari tugas pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 126 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul:

1. Mewujudkan pengembangan daerah pariwisata yang memberikan penguatan pada pengembangan pariwisata daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan didukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana pembangunan lima tahunan ini, sasarannya adalah:

1. Meningkatnya destinasi pariwisata
2. Meningkatnya daya tarik wisata
3. Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata

## **B. Tempat Pariwisata Kabupaten Bantul**

### **Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam**

#### **a. Pantai**

1. Pantai Parangtritis di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
2. Pantai Parangkusumo di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
3. Pantai Depok di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek
4. Pantai Samas di Desa Srigading, Kecamatan Sanden
5. Pantai Patehan di Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden;
6. Pantai Pandansimo di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan;
7. Pantai Kuwaru di Desa Poncosari, Kecamatan, Srandakan.
8. Pantai Goa Cemara di Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden

Berikut ini beberapa alasan yang dimiliki tentang mengapa wisata pantai di Kabupaten Bantul di dijadikan obyek wisata unggulan :

#### **1. Pemandangan yang luar biasa**

Wisata pantai memiliki pemandangan yang sangat eksotis dan bisa membuat suasana menjadi lebih tenang hanya dengan memandangnya. Dengan pasir putih dan hamparan air laut yang berwarna biru, serta deburan ombaknya yang bisa mengaktifkan sistem syaraf dalam tubuh sehingga jauh lebih santai dan rileks.

## **2. Tempat terapi terbaik untuk jiwa**

Wisata pantai bisa menjadi tempat untuk terapi jiwa yang baik. Jika Anda sedang mengalami stress akibat tekanan kerja atau hidup hingga alami insomnia akut maka disarankan untuk datang ke pantai. Suasana pantai bisa menjadi media terapi yang bagus untuk membuat kejiwaan Anda menjadi lebih baik.

## **3. Tempat yang tepat untuk melihat *sunrise* dan *sunset***

Bahwa wisata pantai menjadi satu tempat yang sangat tepat untuk menikmati pemandangan sunrise dan sunset yang terbaik spotnya. Pesona sunrise atau sunset disertai dengan deburan ombak yang menerjang karang bisa membuat suasana menjadi lebih syahdu yang membuat seseorang lebih mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya.

## **4. Jarang memiliki pengalaman menikmati pemandangan pantai**

Wisata pantai jelas akan dipilih oleh mereka yang menyukai pantai namun sangat jarang mendapatkan kesempatan untuk menikmati keindahan pantai. Apalagi jika pantai yang dikunjungi memiliki pemandangan alam yang masih sangat alami.

## **5. Mengubah mood menjadi lebih baik**

Hembusan angin pantai menenangkan dan mengubah suasana hati menjadi lebih tenteram. Warna biru pada laut dan langit menurut penelitian bisa memberikan inspirasi pada rasa tenang dan tenteram.

## **6. Meningkatkan kekebalan sistem imunitas tubuh**

Berwisata di pantai ternyata juga bisa membuat tubuh Kita lebih sehat. Dari menghirup udara pantai yang segar dan baik untuk paru-paru, berendam air laut yang sejuk hingga mendapatkan manfaat dari paparan sinar matahari yang mengandung vitamin D yang bagus untuk kesehatan tulang.

### **b. Pegunungan dan Hutan**

1. Pegunungan Hargodumilah di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan
2. Tugu Pandang Nganjir di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo
3. Hutan pinus Wanagama di desa Mangunan Kecamatan Dlingo;

Hutan wisata dan pegunungan adalah hutan yang diperuntukan untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata, alasan mengapa hal tersebut terjadi karena wilayah pegunungan dan hutan di Kabupaten Bantul menyajikan keindahan alam yang sangat menarik dan kondisi cuaca yang menyenangkan. Udaranya bersih dan sejuk sehingga wisatawan (yang umumnya dari kota) merasa nyaman karena Kabupaten Bantul masih didominasi oleh hutan.

### **c. Goa**

1. Goa Gajah di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo
2. Goa Cerme di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri
3. Goa Jepang di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong
4. Goa Sunan Mas (Surocolo) di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong
5. Goa Nogobumi di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong

6. Goa Payaman di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu

7. Goa Lawa di Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri

Objek Wisata Goa Bantul Yogyakarta adalah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Objek Wisata Goa Bantul Yogyakarta adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari.

Objek Wisata Goa Bantul Yogyakarta memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat di sayangkan jika anda berada di kota Bantul tidak mengunjungi Objek Wisata Goa Bantul Yogyakarta yang mempunyai keindahan yang tiada duanya tersebut.

Objek Wisata Goa di Pundong Bantul Yogyakarta sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan, apalagi saat liburan panjang seperti libur nasional, ataupun hari libur lainnya. Keindahan Objek Wisata Goa Bantul Yogyakarta ini sangatlah baik bagi anda semua yang berada di dekat atau di kejauhan untuk merapat mengunjungi tempat Objek Wisata Goa di kota Bantul.

#### **d. Agrowisata**

1. Pabrik Gula (PG) Madukismo di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan

2. Agrowisata, Argorejo, Sedayu, Bantul. No Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya.

Meningkatkan konservasi lingkungan. Meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam. Memberikan nilai rekreasi, Pemerintah Kabupaten Bantul tengah mengembangkan kawasan itu sebagai agrowisata. Sebab, perbukitan itu memiliki lahan pertanian bawang merah milik warga setempat, dan pabrik gula salah satunya yang ada di Bantul.

## **1. Obyek dan daya tarik wisata Budaya**

### **a. Petilasan**

1. Petilasan Goa Selarong di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan
2. Petilasan Pandansari di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan
3. Petilasan Ambarbinangun di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan
4. Sendang Kasihan di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan
5. Sumber Air Bengkung di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo

Petilasan adalah istilah yang diambil dari Bahasa Jawa yang menunjuk pada suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang. Peninggalan sejarah itu dikemas apik dalam wisata. Contohnya : Gua Selarong merupakan gua bersejarah yang menyimpan cerita Perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda antara 1825-1830. Pasalnya, goa ini menjadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro setelah Belanda membakar kediamannya di Tegalrejo.

## **b. Monumen**

1. Monumen Segoroyoso, di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret
2. Monumen TNI-AU Ngoto di Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan
3. Monumen Brimob di Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu
4. Monumen KB/APSARI di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan
5. Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek

Untuk mengenang peristiwa sejarah perjuangan bangsa, yang pernah ada dan terjadi kabupaten Bantul. Contoh : Pengabdian nilai-nilai kejuangan yang terkandung dalam peristiwa 29 Juli 1947 dalam bentuk monumen diprakarsai oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI R. Soerjadi Soerjadarma. Pembangunan monumen dilaksanakan di lokasi peristiwa jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA, di Desa Jati ngarang Ngoto, Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebelah tenggara kota Yogyakarta.

Monumen yang dibangun berupa tugu yang dicat putih, dengan tinggi 4,5 meter, berbentuk batang tubuh segi enam kerucut yang menopang di atas lapik segi empat bersusun dua mengecil ke atas, di bagian bawah tugu bagian depan dilengkapi bahan granit yang bertuliskan nama-nama korban yang gugur pada peristiwa tersebut. Pada puncak tugu terpancang seekor burung Garuda merentangkan sayapnya. Area sekitar tugu dikelilingi pagar yang terbuat dari bambu. Pembangunan tugu diresmikan pada tanggal 1 Maret 1948. yang kemudian dikenal dengan nama Monumen “Ngoto” atau Tugu “Ngoto”.

### **c. Makam/Ziarah**

1. Makam Raja-raja Mataram di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri
2. Makam Kotagede di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan
3. Makam Dipokusumo di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek
4. Makam Selohening di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek

Diantara banyaknya wisata religi di Bantul, ziarah ke makam masih menjadi favorit masyarakat. penyebar agama Islam di Tanah Air, khususnya Pulau Jawa Di jadikan obyek wisata makam untuk keperluan ber agama. Wisata ziarah selalu menjadi fenomena. Kondisi ini terus berlanjut di Bulan Ramadan. Ziarah makam sejauh ini bisa mendatangkan wisatawan yang besar. Ada perputaran ekonomi yang sangat menjanjikan dalam setahun.

### **d. Museum**

1. Museum wayang kekayon di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan
2. Museum batik di Dusun Ketandan Tengah, Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri

Museum adalah Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat, dan di Kabupaten Bantul banyak peninggalan jaman dahulu agar peninggalan tetap terawat dan terjaga dengan baik maka dibangun wisata museum. museum menjadi pusat edukasi, pendidikan untuk masyarakat,” Museum memiliki informasi-informasi koleksi yang beragam. Masyarakat bisa mengetahui kehidupan di masa lampau melalui informasi-informasi yang tersaji bersama koleksi museum.

#### **e. Padepokan**

1. Padepokan seni Bagong Kusudiharjo di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan
2. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Rumah budaya Padepokan Bagong Kussudiardja yang mewujudkan seni pertunjukan sebagai media dialog dan pembelajaran untuk merangsang kegairahankreativitas komunitas seni dan masyarakat. Yayasan Bagong Kussudiardja mengolah proses-proses pembelajaran tentang seni dan menggunakan seni sebagai media, melalui presentasi karya seni pertunjukan, fasilitas pengembangan daya kerja kreatif yang meningkatkan penyertaan aktif masyarakat bersama dengan masyarakat Yogyakarta sebagai kota perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal dengan kekayaan potensi pesona alam dan budayanya sampai sekarang dan masih tetap merupakan daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan Mancanegara. Yogyakarta masih terjaga tatanan kehidupan masyarakat Jawa khususnya dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin pada kegiatan adat istiadat, sosial kemasyarakatan, kesenian dan sebagainya. Seni Budaya yang masih terjaga keaslian.

#### **f. Situs Sejarah**

1. Situs Kraton Kerto di Desa Pleret Kecamatan Pleret
2. Situs Watu Lindung di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan
3. Situs Kotagede di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan
4. Situs Watu Cantheng di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan

5. Situs Watu Gilang di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan No Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Buatan.

Situs Sejarah adalah tempat dimana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah, dan tujuan dibuatnya wisata situs sejarah untuk melestarikan tradisi yang *adasecara* turun temurun seperti pesta budaya dan kegiatan adat istiadat. Salah satunya Kotagede merupakan kota kuno dan bersejarah ketika jaman Mataram dan sesudahnya. Disinilahpertamakali Keraton Mataram berdiri dibawah titah Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati.

## **2. Obyek dan Daya Tarik Wisata Buatan/ Minat Khusus**

### **a. Wisata Taman Rekreasi dan Pemandian**

1. Kolam renang Parangtritis di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek
2. Kolam renang Tirtotamansari di Desa Trirenggo Kecamatan Bantul
3. Kid Fun Park di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan
4. Grand Puri Waterpark di Gabusan, Kecamatan Sewon

Wisata taman rekreasi dan pemandian dibangun di karenakan untuk memanfaatkan lahan yang ada dan meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di KabupatenBantul. Serta sebagai tempat pariwisata dan rekreasi, sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan bagi daerah sekitarnya, serta sebagai lokasi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### **b. Wisata Pendidikan**

1. Rumah Budaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon
2. Bangunan Jawa Antik di Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan

3. Gumuk pasir di Parangtritis, Kecamatan Kretek
4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon

Wisata Pendidikan dibangun untuk memberikan edukasi/pembelajaran kepada masyarakat, pendidikan di Kabupaten Bantul Bantul juga banyak sehingga menjadi faktor pendukung di banggunya wisata pendidikan. Serta sebagai ajang untuk liburan atau refreshing dari kegiatan belajar di kelas tapi juga sebagai celah atau kesempatan untuk memperoleh ilmu lebih banyak dengan cara yang lebih menyenangkan.

### **c. Sentra Industri Kerajinan**

1. Kerajinan Gerabah Kasongan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan
2. Kerajinan Kayu, wayang klithik di Dusun Kreet Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan
3. Kerajinan Bambu di Desa Munthuk Kecamatan Dlingo
4. Kerajinan Kulit Dusun Manding Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul
5. Kerajinan Gamelan Dusun Pelemsewu, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon

Industri kerajinan saat ini menjadi tujuan alternatif wisatawan sebab setelah mengunjungi obyek wisata di DIY maupun Bantul, wisatawan belanja kerajinan. Oleh sebab itu, instansinya akan terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor kerajinan dan kesejahteraan pelaku usaha.

### C. JUMLAH KUNJUNGAN DAN PENDAPATAN DARI PARIWISATA

**Tabel 2. 1. Data Kunjungan Wisatawan Sektor Pariwisata 2017-2021**

Tahun	Target	Kunjungan	Pendapatan	Presentase	Keterangan
2017	13.750.000.000	3.405.685	17.090.253.000	124,29%	
2018	26.299.521.000	4.204.422	29.066.377.250	110,52%	
2019	28.214.350.000	5.166.165	31.756.578.250	112,55%	
2020	14.500.042.500	2.348.313	13.385.022.250	91,91%	Pandemi Covid-19
2021	14.563.650.250	2.819.698	16.954.700.250	116,38%	Pandemi Covid-19

*Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul*

Pandemi Covid-19 tidak hanya memberikan dampak di bidang kesehatan namun juga berpengaruh pada beberapa bidang/sektor salah satunya bidang pariwisata. Secara umum sangat dirasakan bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 dan 2021 juga menurun akibat adanya kebijakan relaksasi pajak dan penurunan target retribusi yang merupakan imbas penutupan obyek wisata di Bantul. Dilihat dari data di atas jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bantul dari beberapa tahun sebelumnya mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dan dengan adanya sebuah pandemi *covid-19* dan mengalami penurunan yang sangat drastis yang di alami selama 2 tahun yaitu pada masa pandemi *covid-19* yang sangat berdampak besar terhadap sektor pariwisata.

## D. KEADAAN GEOGRAFI

Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara geografis terletak pada  $07^{\circ} 44' 04''$  -  $08^{\circ} 00' 27''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 12' 34''$  -  $110^{\circ} 31' 08''$  Bujur Timur

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506, 85 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 17 Kapanewon, 75 Kalurahan, dan 933 Padukuhan.

**Gambar 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Bantul**



*Sumber: Bappeda Bantul*

## E. DEMOGRAFI

Populasi penduduk di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 mencapai 998.647 jiwa. Dari jumlah tersebut laki-laki berjumlah 497.175 jiwa dan perempuan berjumlah 501.472 jiwa, dengan luas wilayah 506.85 Km<sup>2</sup> kepadatan penduduk adalah 1986 jiwa per Km<sup>2</sup>. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan angkatan kerja 571.268 jiwa. Tahun 2021, pencari kerja yang terdaftar pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi menurut tingkat pendidikan sejumlah 5953 jiwa.

**Tabel 2. 2. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul**

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Srandakan	31.244	31.276	31.164	31.218	31.082
2.	Sanden	32.494	31.924	31.967	31.972	31.810
3.	Kretek	31.082	30.837	30.855	30.863	30.764
4.	Pundong	35.484	35.448	35.668	35.908	35.666
5.	Bambanglipuro	41.385	41.201	41.621	41.880	41.706
6.	Pandak	51.770	51.492	51.781	52.013	52.136
7.	Bantul	63.124	62.788	63.669	64.365	64.652
8.	Jetis	57.474	57.408	58.206	58.549	58.631
9.	Imogiri	62.419	62.531	63.179	63.542	63.835
10.	Dlingo	38.666	38.502	39.092	39.537	39.998
11.	Pleret	46.663	46.825	47.499	48.170	48.497
12.	Piyungan	50.846	51.051	51.692	52.333	52.862
13.	Banguntapan	107.548	107.596	110.126	111.955	113.298
14.	Sewon	97.420	97.034	98.506	99.807	100.563
15.	Kasih	100.330	100.222	102.175	103.527	104.599
16.	Pajangan	34.674	34.894	35.465	36.040	36.551
17.	Sedayu	46.053	46.152	47.053	47.646	48.156
<b>Jumlah</b>		<b>928.6756</b>	<b>927.181</b>	<b>939.718</b>	<b>949.325</b>	<b>954.706</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul*

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul menurut wilayah kapanewon, terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan, Kasihan dan Sewon. Daerah tersebut merupakan daerah percepatan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian sehingga secara umum menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di lokasi tersebut. Ditilik dari kepadatan penduduk kapanewon, penyebaran penduduk belum merata. Kapanewon dengan luas wilayah yang lebih kecil mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kapanewon yang memiliki luas wilayah lebih besar.

**Gambar 2. 2.Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

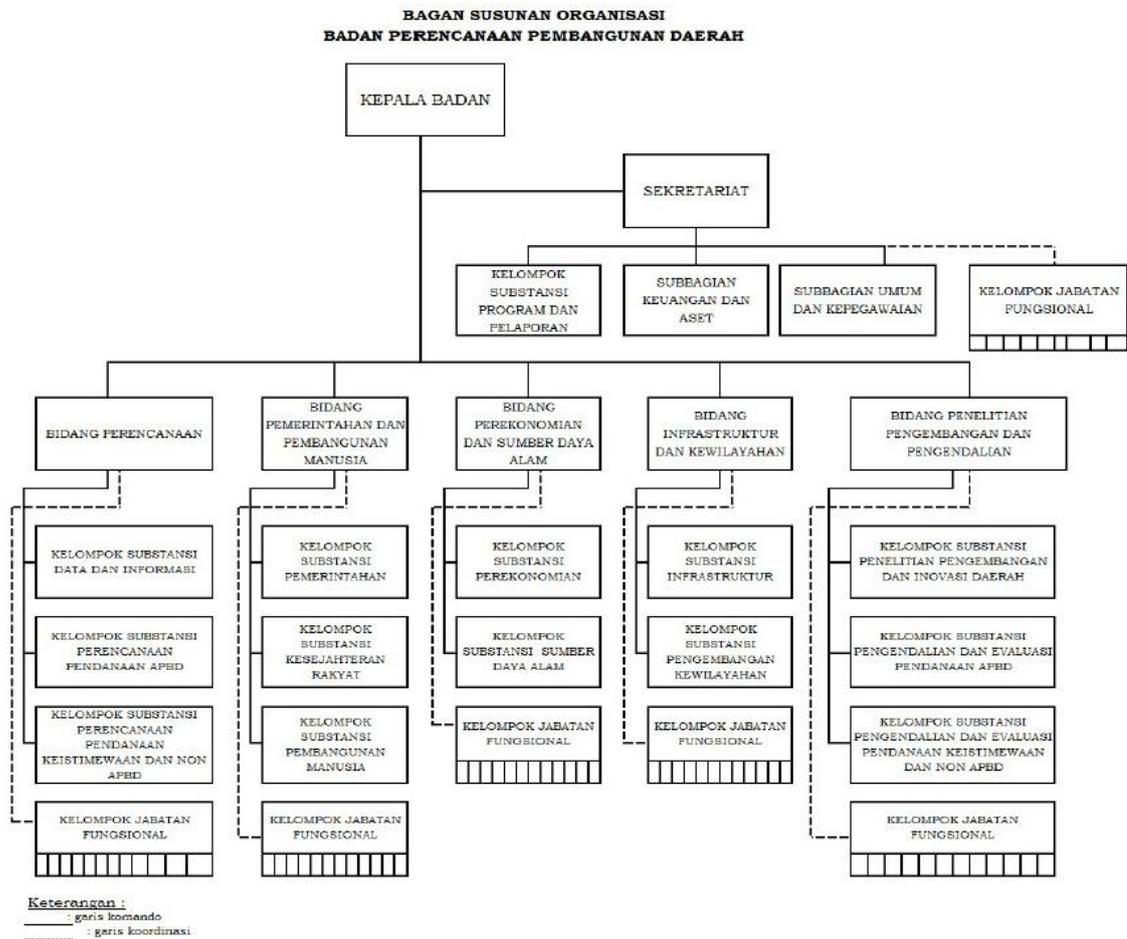


*Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul*

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin diperlukan guna menentukan kebijakan yang berprespektif *gender*. Komposisi penduduk laki-laki sebanyak 497.175 jiwa dan Perempuan 501.472 jiwa, sehingga dalam menentukan suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kesetaraan gender.

## F. Struktur Organisasi

Gambar 2. 3. Struktur Organisasi



*Sumber Bappeda Bantul.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian analisis data di lapangan mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dapat di simpulkan sebagai berikut :

Proses pelaksanaan pembangunan dan sinkronisasi di Kabupaten Bantul melibatkan yaitu Bappeda Kabupaten Bantul, dinas pariwisata, pemerintah desa, pokdarwis, dan pelaku wisata melakukan dengan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan. Tahapan musyawarah merupakan tahapan dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada pemerintah dan masyarakat. Musyawarah pembangunan dilakukan untuk perencanaan pembangunan yang demokratis dan berbasis pada masyarakat sekitar, musyawarah pembangunan merupakan yang demokratis di tingkat Kabupaten, sebagai cara menindak lanjuti dalam pembangunan yang bertujuan untuk sinkronisasi dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.

1. Dalam hal ini terdapat beberapa kendala dalam perencanaan pembangunan yaitu sebgayaan besar destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul berada pada lahan (*sultan Ground*) atau tanah kas desa , badan promosi pariwisata daerah Kabupaten Bantul yang baru berdiri pada tahun 2020 belum dapat melaksanakan tuganya dengan maksimal dikarenakan pandemi *covid-19* sehingga belum membentuk

sebuah pelaksanaan harian dan di perlukan dukungan dana, dan tidak semua kebutuhan pengembangan pemasaran masuk dalam rencana kerja strategis dinas pariwisata menjadikannya kurang maksimalnya Sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas, serta sarana prasarana pemasaran yang tidak maksimal. Dan kurangnya sumber daya manusia di bagian lain yang mengakibatkan menyita sebuah energi tugas dan pokok fungsi pegawai.

2. Bahwa Dinas Pariwisata dalam melaksanakan pembangunan selalu berkordinasi dengan pemerintah pusat dan dinas terkait atau dinas pariwisata dan melaksanakan pendampingan sehingga Dinas Pariwisata bukan hanya memberikan dana namun Dinas Pariwisata juga selalu mensupport setiap program, dan Dinas Pariwisata juga menjadi mediator, merumuskan program dan juga pengorganisasian dalam bidang perencanaan dan pembangunan dan juga selaku pelaksanaan jika terjadi proses terdapat sebuah persoalan dalam prosos pembangunan. Dan Dinas Pariwisata memberikan pertimbangan pertimbangan terkait dengan hasilnya dan potensi, khususnya dalam menentukan skala prioritas pembangunan, seringkali pembangunan terjadi ketidak kesesuaian atau permasalahan karena keinginan semata bukan dari kebutuhan masyarakat.
3. Bahwa Dinas pariwisata telah mampu berperan sebagai fasilitator pembangunan daerah di Kabupaten Bantul, peran Dinas Pariwisata

dalam sinkronisasi pembangunan sangat baik dari proses musyawarah dari tingkat yang paling bawah pemerintah Desa dan peran pemerintah tidak selalu mendominasi dalam melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan, karena peran telah bergeser pada pokdarwis atau masyarakat. Sinkronisasi dilakukan untuk mendukung pemerintahan yang baik sebagai fasilitator pembangunan. Dalam hal ini pembangunan di Kabupaten Bantul sudah mengalami banyak sinkron.

## **B. Saran**

Pada dasarnya peneliti dapat memahami bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi pelaksana saat mensinkronisasikan perencanaan pembangunan. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti melihat ada beberapa hal yang masih kurang dan tentu sangat baik apabila diberikan saran, dengan harapan dapat berguna bagi Dinas Pariwisata Bantul dalam mensinkronisasikan pelaksanaan pembangunan, untuk meningkatkan sinkronisasi pembangunan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya anggaran yang jelas dari pemerintah yang jauh-jauh hari sehingga pembangunan dapat di sesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga tidak menjadikan pembangunan yang menyendat.
2. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu di turunkan untuk Dinas Pariwisata dalam pengawaasan pembangunan

agar benar-benar meneliti pembangunan yang sedang di laksanakan guna untuk mensinkronisasikan.

3. Perlunya ada fasilitator dari pokdarwis atau masyarakat yang berfungsi untuk menyampaikan usulan dari kelompok sadar wisata atau masyarakat, fasilitator ini akan menginformasikan kepada pemerintah pusat bahwa pembangunan sudah berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Kabul Mahi& Sri Indra Trigunarso.(2017) PerencanaanPembngunan Daerah (Teori dan Aplikasi). Bandar Lampung: Kencan.
- Bambang Sunaryo, (2013), Kebijakan Pembangaunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Inonesia, Yogyakarta: Gava Media.
- Endang Mulyatiningsih. (2013). Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan Imam (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta 13220.
- Kuncoro, Mudrajad, (2018), Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan, Jakarta: Erlangga.
- Leiper,Neil.(2008).Tourism Systems : An Inter disciplinary Perspective. Departement of Management Systems, Bussiness Studies Faculty, Messey University, Palmerston North, New Zealand.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosda karya Offset.
- Mufida, A. (2020). *Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19*. Adalah Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159-166.
- Nurdiani, Nina. 2014. Teknik *Sampling Snow Ball* Dalam Penelitian Lapangan. Jakarta Barat.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, da R&D. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sugiyono (2019). Statistika untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta.
- Tjutju Soendari. (2020). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: UPI.

### **Daftar Laman :**

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-indonesia-dan-permasalahannya-44>

<https://bappeda.bantulkab.go.id/index.php/berita-bappeda/item/149-kr-jogja-petakan-permasalahan-pembangunan-kala-pandemi-covid-19>

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul - Struktur Organisasi ([bantulkab.go.id](http://bantulkab.go.id))

Tahun Depan, Fokus Pembangunan Bantul di Bidang Pariwisata - [Harianjogja.com](http://Harianjogja.com)

### **Dokumen :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rencana Kerja Pemerinthan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

### **Daftar Jurnal :**

- <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/30316>
- <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/5211>
- <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1679>
- [https://repository.unsri.ac.id/16383/57/RAMA\\_62201\\_01031281419116\\_0028085803\\_0003096401\\_01\\_front\\_ref...pdf](https://repository.unsri.ac.id/16383/57/RAMA_62201_01031281419116_0028085803_0003096401_01_front_ref...pdf)

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/tataloka/article/view/683>

## DOKUMENTASI PENELITIAN









## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### Wawancara Informan BAPPEDA

1. Pelaksanaan pembangunan
  - a. Pembangunan apa yang sudah berjalan di Kabupaten Bantul pada saat ini ?
  - b. Bagaimanakah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda di Kabupaten Bantul secara umum ?
  - c. Kendala apa yang di alami dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ?
  - d. Bagaimanakah solusi menghadapi kendala-kendala tersebut ?
  - e. Apa yang di lakukan atau langkah apa yang di lakukan untuk pembangunan agar bisa merata ?
  - f. Apa yang membuat tidak sinkron antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ?
  - g. Bagaimanakah sejauh ini hubungan kerja sama antara Bappeda dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ?
  - h. Apakah bidang-bidang tata kerja dalam tubuh Bappeda sudah melaksanakan fungsinya dengan optimal ?
2. Program capaian pembangunan
  - a. Program capaian yang seperti apa yang di rencanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam perencanaan pembangunan pariwisata ?
  - b. Apakah ada strategi yang di lakukan untuk pencapaian pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ?

- c. Apa dampak dari capaian pembangunan pariwisata terhadap masyarakat di Kabupaten Bantul?
  - d. Apakah pembangunan dalam pariwisata merupakan rencana capaian pembangunan ?
  - e. Apakah dalam capaian pembangunan ini merupakan hasil dari masukan masyarakat ?
  - f. Bagaimana Bappeda Kabupaten Bantul dalam upaya pengendalian evaluasi perencanaan program pembangunan pariwisata ?
  - g. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung bagi Bappeda dalam menjalankan sinkronisasi di Kabupaten Bantul ?
3. Kendala dalam mensinkronisasi
- a. Apakah pembangunan sudah sesuai dengan rencana ?
  - b. Apakah pembangunan khususnya di bidang pariwisata di Kabupaten Bantul sudah merata ?
  - c. Apakah pemerintah Kabupaten Bantul juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses pembangunan ?
  - d. Kendala apa yang di alami dalam sinkronisasi di Kabupaten Bantul ?
  - e. Bagaimana peran Bappeda dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam proses sinkronisasi pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul ?
  - f. Apakah ada dampak yang baik dalam sinkronisasi ini ?